

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Sulimin

Politeknik Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: sulimin.polinema@gmail.com

*Corresponding author: sulimin.polinema@gmail.com

Abstrak: E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Implementasi E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga bisa mencapai Good and Clean Government. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Malang dengan tujuan untuk mengetahui Peranan Sumber Daya Manusia dalam Keberhasilan Implementasi E-Procurement. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil wawancara dengan informan serta menjelaskan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data sehingga mudah dipahami. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pada prinsipnya merupakan penjabaran dari pelaksanaan belanja negara untuk mendapatkan produk/jasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Konsep tentang e-procurement merupakan tahapan modern dari tata cara pengadaan di dunia. Konsep ini terdiri dari serangkaian prosedur, dan langkah-langkah organisasional dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang memungkinkan seluruh proses pengadaan dijalankan secara online melalui fasilitas jaringan internet. Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di dalam proses pelaksanaan e-procurement guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan lelangnya, perlu diperhatikan bahwa sumber daya manusia yang ada terutama yang ada didalam unit layanan pengadaan barang atau jasa harus mempunyai beberapa kriteria seperti kompetensi khusus, keahlian/kemampuan tentang sistem informasi yang terupdate, pengalaman, mempunyai motivasi yang tinggi, bisa berkomunikasi, kerjasama serta koordinasi tim.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia; Implementasi E-Procurement, Politeknik Negeri Malang

Abstract: E-Procurement is the procurement of goods/services carried out using information technology and electronic transactions in accordance with legal regulations. The implementation of E-Procurement in the procurement of goods/services is expected to apply the principles of procurement, namely effective, efficient, transparent, open, competitive, fair, and accountable, thereby achieving Good and Clean Government. This research was conducted at Politeknik Negeri Malang with the aim of understanding the Role of Human Resources in the Success of E-Procurement Implementation. This research uses a descriptive qualitative method, which involves collecting and processing

data from interviews with informants and explaining the results by describing the data processing so that it is easy to understand. The research results show that the procurement of goods/services essentially represents the implementation of state spending to obtain products/services in relation to state financial management. The concept of e-procurement is a modern stage of procurement procedures worldwide. This concept consists of a series of procedures and organizational steps utilizing information technology facilities that enable the entire procurement process to be conducted online through internet network facilities. The importance of human resource management in the implementation process of e-procurement for the smoothness and success of the auction implementation needs to be noted that the existing human resources, especially those in the goods or services procurement unit, must meet several criteria such as special competencies, expertise/ability in the latest information systems, experience, high motivation, communication skills, teamwork, and coordination.

Keywords: Human Resources; E-Procurement Implementation, Politeknik Negeri Malang

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat sebagai dampak langsung globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh setiap organisasi jenis apapun, baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi sosial. Oleh karena itu, kondisi tersebut menimbulkan persaingan yang ketat di segala bidang. Agar dapat memenangkan persaingan dan menciptakan organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif, maka setiap organisasi dituntut untuk mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat serta dituntut untuk mampu menciptakan inovasi-inovasi secara terus-menerus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa sosial (Mas'ud, A., Kresnani, 2019; Megananda, 2023; Widiastuti, 2019).

Salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mendukung hal tersebut adalah pegawai atau karyawan (Sitinjak et al., 2021). Oleh sebab itu pegawai atau karyawan tersebut harus dipekerjakan secara efektif, efisien dan manusiawi. Agar kondisi tersebut dapat tercipta, maka organisasi perlu membuat perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan SDM organisasi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang (Ardiana et al., 2010; Nyanyi et al., 2022). Dengan demikian, organisasi tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi SDM yang dibutuhkan. Sumber daya manusia merupakan faktor paling terpenting dalam suatu perusahaan/instansi agar menjadi perusahaan yang besar, dengan sumber daya manusia yang cukup, perusahaan/instansi akan mampu melaksanakan kegiatan suatu pekerjaan tanpa hambatan yang berarti, termasuk juga dalam melaksanakan lelang secara *e-procurement* (Mokoginta et al., 2017).

E-Procurement merupakan suatu metode pengadaan secara lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi yang bertujuan agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel (Sutedi, 2012). Pelaksanaan *e-procurement* yang tangguh dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya mampu memenuhi tujuan dari penerapan *e-procurement* sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 (Hidayat, 2015). Salah satu bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-Governance* yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan *e-Procurement* (Nurlukman, 2018).

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektronik (*e-procurement*) seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang sudah dijelaskan dalam pasal 6 pada peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. *E-procurement* memiliki manfaat bagi instansi ataupun pengembang sistem serta juga untuk semua penyedia barang/ jasa dan masyarakat luas yang ingin mengenal proses penyelenggaraan dapat mendapatkan harga untuk penawaran yang banyak serta proses menggunakan administrasi yang sederhana. Sebaliknya, para penyedia barang/jasa juga dapat menurunkan biaya administrasi, meningkatkan peluang untuk perusahaan, mendorong timbul persaingan secara sehat, dan dapat membuat peluang

bisnis tersedia untuk semua orang. Selain itu, *e-procurement* dianggap mampu memberikan pengelolaan yang lebih mudah, proses pembelian dan penjualan yang lebih cepat, dan mengurangi biaya transaksi, koordinasi yang baik, dan juga meningkatkan kerjasama yang terjadi antara penyedia barang/jasa. Teknologi informasi bisa membuat biaya lebih baik dan sistem pengadaan publik lebih beraneka macam (Sumaya, 2024)

E-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan baru diterapkan, Standard operational procedur (SOP) *e-procurement* sendiri masih mengikuti ketentuan pengadaan manual, *e-procurement* meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (Nasution, 2012). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) adalah sistem yang tepat digunakan karena lebih transparan, efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa sistem konvensional (*face to face*) dan Peranan lembaga pengawasan pengadaan barang dan jasa belum optimal karena masih ditemukan banyaknya penyelewengan terhadap proses pengadaan barang dan jasa (Sari et al., 2012). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di dapat menghemat anggaran, efisiensi waktu pengadaan, penerapan prinsip efektif dan akuntabel, penerapan prinsip terbuka (Putra Nugraha et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan sistem *e-procurement* dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan penipuan pengadaan barang dan jasa (Primastiwi et al., 2020)

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat faktor kekuatan yakni kebijakan tersebut memudahkan pengguna dalam melaksanakan proses pengadaan, terlaksananya proses pengadaan yang sudah mengacu pada regulasi yang berlaku, tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang, adanya peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM Tim LPSE, serta pejabat pelaksana telah mengedepankan etika pengadaan. Pada faktor kelemahan yakni kurangnya SDM pada pranata komputer, masih terjadi overlapping tugas dan fungsi, terjadi *refocusing* anggaran (Putra Nugraha et al., 2022). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Procurement* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Penerapan *E-Procurement* melalui aplikasi *E-Purchasing* menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Sehingga pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan keuangan. Manfaat dari penerapan *E-Procurement* dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran (Wijayanti & Ardana, 2021). Hasil penelitian dari judul penelitian Implementasi *E-procurement* Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu Impelementasi *e-procurement* itu sendiri sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan karena setelah aturan itu terbit maka seluruh SKPD yang terkait wajib untuk menjalankan aturan tersebut meskipun terpaksa, *E-procurement* juga telah mencapai tujuannya yaitu mengurangi KKN, membantu berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti prinsip efisien dan efektif, juga sudah terlaksananya prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil (Sahar & Sari, 2022).

Unit Layanan Pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Malang sangat memperhatikan semua sumber daya manusia baik dalam hal pengetahuan, wawasan di dalam pengadaan barang/jasa guna untuk mendukung terlaksananya *e-procurement*, pendukung utama dari keberhasilan tersebut sumber daya manusianya yang di utamakan dalam proses pengadaan harus bisa memahami semua aturan yang berlaku dan oleh sebab itu Politeknik Negeri Malang selalu mendahulukan untuk penambahan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan masalah pengadaan.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesiapan sumber daya manusia di Politeknik Negeri Malang dalam Teknologi Informasi Komputer untuk menunjang *e-procurement*, bagaimana implementasi *e-procurement* di Politeknik Negeri Malang, dan apa saja kelebihan dan kekurangan Implementasi *e-procurement*. Penelitian ini berfokus pada sumber daya manusia dalam kesiapan penggunaan Teknologi Informasi Komputer dalam menunjang *e-procurement* di Politeknik Negeri Malang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahannya..

KAJIAN LITERATUR

E-procurement

E-procurement adalah proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website (Mokoginta et al., 2017; Primastiwi et al., 2020) sehingga pelaksanaan pengadaan bisa dilakukan secara lebih responsif dan dinamis (Huda, 2017; Sahar & Sari, 2022). Dengan menggunakan teknologi informasi maka pengadaan menjadi efisien dan efektif (Wijayanti & Ardana, 2021).

Sistem *e-procurement* merupakan kumpulan dari sejumlah komponen-komponen atau entitas-entitas di dalam organisasi, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang memiliki fungsi untuk menjalankan konsep *e-procurement* di dalam organisasi. Sistem ini meliputi berbagai aktivitas dan proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam organisasi yang membutuhkan barang/jasa sehingga tujuan pengadaan barang/jasa tersebut bisa tercapai dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya teknologi Internet. Sistem *e-procurement* dikembangkan dan dioperasikan oleh organisasi untuk mendukung organisasi dalam mendapatkan produk atau jasa yang tepat, dengan kualitas yg tepat, pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan harga yang tepat.

Sistem *e-procurement* merupakan salah satu bentuk implementasi dari e-commerce Business to Business, sehingga interaksi antara organisasi penyedia barang/jasa dengan organisasi pembeli barang/jasa memanfaatkan sepenuhnya teknologi Internet/website. Secara umum, tujuan dari diterapkannya *e-procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. *E-procurement* dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para user, mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, serta mendukung proses monitoring dan audit.

Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, maka dapat diketahui beberapa

manfaat lebih dari *e-procurement* ini. Manfaat tersebut adalah layanan lebih cepat, dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang terkadang menghabiskan waktu yang tidak sedikit; transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses siapa saja; dan dengan adanya *e-procurement* ini menjadi satu upaya didalam mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk dapat menghadapi tantangan dan bersaing diperkembangan global ini. Dan Proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih mudah, Menghemat biaya administrasi pengadaan, serta biaya penggunaan bahan habis pakai, Mempercepat proses pengadaan barang/jasa, Mendapatkan harga dan produk barang/jasa yang lebih kompetitif dengan semakin banyaknya peserta yang mendaftarkan diri mengikuti pelelangan, Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

E-procurement di organisasi pemerintah adalah *e-procurement* yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pemerintah untuk pengadaan barang/jasa milik pemerintah dengan menjalankan sistem *e-procurement* yang harus mengikuti ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah dengan menggunakan dana yang sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah. *E-procurement* ini akan melibatkan berbagai organisasi/perusahaan bukan pemerintah sebagai penyedia/penjual barang/jasa.

Secara umum, *e-procurement* di pemerintah dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh para penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, sedangkan *e-purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. Dalam *e-purchasing*, pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran.

Dasar hukum pelaksanaan *e-procurement* adalah Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *e-tendering*, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Kriteria keberhasilan *e-procurement* (di organisasi pemerintah)

Pada *e-procurement* yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, menurut ketentuan peraturan perundangan, suatu *e-procurement* dapat dinyatakan berhasil apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- E-procurement dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat
- Persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional
- Kinerja institusi pemerintahan yang meningkat.
- Mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana
- Menciptakan persaingan usaha yang sehat
- Meningkatkan akurasi data
- Mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi
- Peningkatan proses (pemesanan yang simpel, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi).
- Efisiensi dalam bentuk finansial

Di dalam pelaksanaan *e-procurement* berbasis sistem pengadaan secara elektronik dikatakan berhasil dimana dalam lelang ada peserta yang menawarkan pekerjaan tersebut secara wajar di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) dan peserta yang memasukan penawaran lebih dari 1 serta semua peserta yang mengikuti pelaksanaan lelang tersebut dengan mematuhi semua persyaratan yang di tentukan panitia untuk lelang *e-tendering* dan ketersediaan semua barang dan spesifikasi yang sesuai pada kegiatan pembelian barang di *e-catalog*.

Faktor Sumber Daya Manusia untuk e – procurement

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading and controlling*, dalam setiap aktifitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Handoko, 2011; Mangkunegara, 2006; Siagian, 2014).

Berbagai faktor yang melekat pada sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh berbagai pustaka mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan di antaranya: kompetensi, pengalaman, motivasi, kemampuan bekerja sama. Secara umum, kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan, atribut personal dan pengetahuan yang tercermin melalui perilaku kinerja atau kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan ketrampilan dan sikap kerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi (Moehariono, 2010). Kompetensi dan Kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan Pengguna Anggaran / end user yang tentunya dengan

memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta asas manfaat dari barang/jasa tersebut, karena hasil akhir dari pengadaan barang/jasa adalah untuk masyarakat. Kompetensi terdiri dari atas 5 (lima) Karakteristik yaitu : *Knowledge* (pengetahuan), *Skills* (ketrampilan), *Self-Concept* (konsep diri), *Traits* (sifat) dan *Motives* (motif).

Berdasarkan Perpres 54 Th. 2010, organisasi pengadaan barang jasa (PPK, ULP/Pejabat Pengadaan) harus memiliki sertifikat ahli pengadaan barang jasa, artinya pengadaan barang jasa itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, berdasarkan Perpres 54 Th 2010, pengertian sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang Jasa. Karyawan dapat dikatakan memiliki pengalaman kerja jika sudah melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Adapun hal-hal yang menentukan berpengalaman atau tidaknya seorang karyawan adalah Lama waktu atau masa kerja, Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan, Jenis pekerjaan.

Faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan gairah kerja pegawai dimana dan instansi apapun adalah adanya motivasi dan kemampuan kerja yang dimiliki pegawainya. Hal ini cukup beralasan sebab kemampuan dan motivasi kerja merupakan faktor yang mencerminkan sikap dan karakter seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja tidaklah mungkin mencapai hasil yang maksimal apabila tidak ada motivasi, karena motivasi merupakan suatu kebutuhan di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu juga berbagai ragam kemampuan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja mengingat pegawai merupakan titik sentral dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Malang. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai/staf yang berada dibagian pengadaan barang dan jasa, staf perencanaan, dan bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) karena pada bagian tersebut yang berhubungan langsung dengan sistem pengadaan secara elektronik. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Leksono, 2020).

Sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian, yaitu mengkaji dan mengungkapkan bagaimana faktor-faktor sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-procurement* di Politeknik Negeri Malang, maka penelitian ini menggunakan metode case study. Metode ini sesuai untuk mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dan yang tidak bisa dilepaskan dari konteks, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak cukup jelas. Dalam hal ini adalah fenomena peran faktor sumber daya manusia dalam konteks implementasi tiga *e-procurement* yang selesai dan berhasil. Metode ini terutama sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana dan mengapa. Sambil menyadari bahwa ada banyak dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi *e-procurement*,

penelitian ini mengkaji bagaimana dan mengapa sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-procurement* di Politeknik Negeri Malang.

Pengolahan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan deskriptif, Menurut Moh. Nazir (2011), mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analisis data dalam penelitian ini berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil dari pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil suatu penelitian. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga menjadi data pembahasan yang sinergis dan terpadu sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa Diskripsi kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis empiris menghasilkan deskripsi tentang posisi dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Politeknik Negeri Malang dan lembaga Pemerintah lainnya. Tujuan analisis adalah untuk memberikan masukan serta jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang ada saat ini dalam upaya memperluas sudut pandang normatif yang ada kaitannya dalam pengaturan dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Layanana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Di dalam pelaksanaan lelang ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem informasi atau jaringan internet dengan alamat www.lpse.polinema.ac.id seperti tampak pada gambar di bawah :

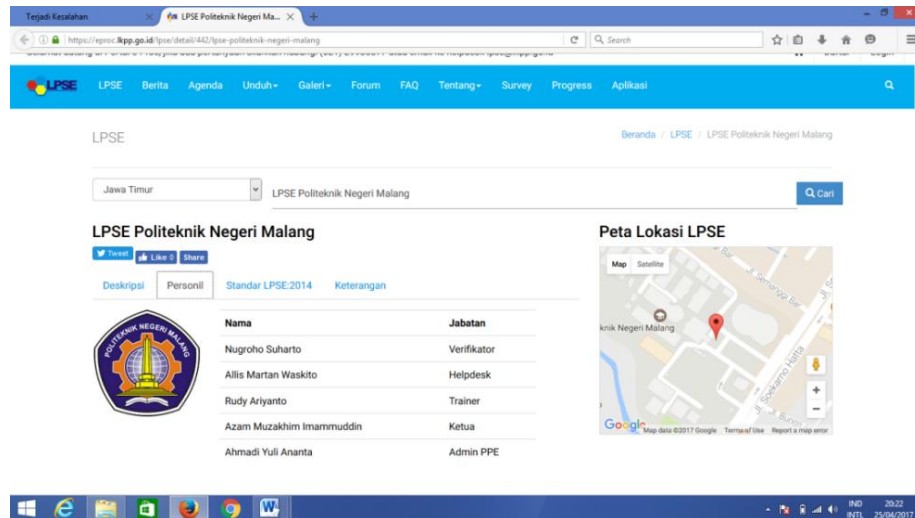


Gambar 1. Web Sistem LPSE



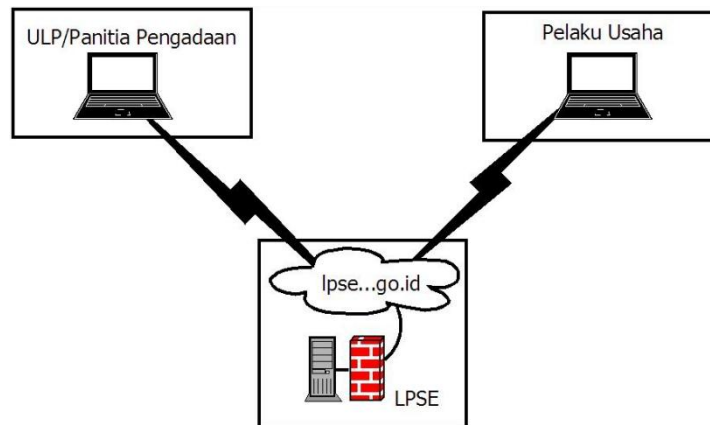
Gambar 2. Dalam Sistem LPSE

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit.



Gambar 3. Kepengurusan LPSE

Di mana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.



Gambar 4. LPSE Menjembatani ULP dengan Pelaku Usaha

LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- Menyediakan pelatihan kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa;
- Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/panitia dan penyedia;

- d. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa;

Sumberdaya Manusia yang terlibat dalam *e-procurement*

Dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), LPSE harus merekrut SDM dengan kompetensi yang harus memenuhi standard. Job person madenya harus sesuai tuntutan pekerjaan dan harus di atas standard yang sudah ditetapkan. Hal ini diterapkan supaya SDM itu bisa menghadapi tantangan ke depan. Lalu dalam hal pengembangan jabatan, selain jabatan struktural, profesionalisme juga harus didukung oleh jabatan-jabatan fungsional yang bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengembangkan karirnya dalam pengelolaan keuangan Negara.

Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, disebutkan pada point 17. Strategi 5 - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan eliteracy masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan melaksanakan dan pengembangan e-government. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.

Keunggulan dalam *e-procurement* yang dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para user dan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, diharapkan dapat memangkas proses kerumitan dalam pengadaan secara konvensional dan sekaligus memangkas biaya. Proses pengadaan barang/jasa sendiri selalu ada kepanitian yang ditandai dengan adanya Unit kerja di Instansi, dalam hal ini di Politeknik Negeri Malang dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas untuk memproses semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Malang. Dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa tak terlepas dari semua peranan sumberdaya manusia dari mulai bagian perencanaan proses pengusulan, pelelangan, pengawasan, penerimaan hasil kegiatan.

Sumber daya yang dimaksud berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Dimensi ini penting karena diakui bahwa tanpa sumber daya yang memadai maka suatu produk kebijakan hanya tinggal "hitam di atas putih" saja. Hanya merupakan dokumen penting yang tidak punya makna sama sekali dalam praktiknya. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi syarat lain agar implementasi kebijakan eprocurement dapat berjalan dengan efektif. didalam proses pelelangan sumberdaya manusianya sangat berpengaruh dalam hal untuk mencapai semua tujuan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Sangat pentingnya sumberdaya manusia yang menduduki di kepanitian/pokja ULP oleh sebab itu untuk mendapatkan barang/jasa yang baik maka unsur sumberdaya manusia inilah yang harus kompeten dibidangnya dan bukan sembarang orang yang ada disini. Hambatan implementasi *e-procurement* adalah kesiapan sumber daya manusia terkait masalah mental, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara on-line dikalangan vendors maupun unit-unit di perusahaan, kompatibilitas dan kehandalan sistem yang dibangun masih diragukan, auditor khususnya Badan Pemeriksa Keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar transaksi *on-line*, dan belum adanya aturan dan standar pelaksanaan *e-procurement*. Banyak juga lelang yang sering gagal kemungkinan juga dikarenakan sumberdaya manusianya yang kurang kompeten atau kurang dalam pengetahuan.

Sumber daya manusia (*people*) yaitu pengelola maupun penyedia barang dan jasa yang menguasai sistem informasi teknologi sehingga dapat mengoperasikan *e-procurement* dengan baik, dan infrastruktur yaitu ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengaplikasian *e-procurement*. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tidak terlepas juga dari peranan pimpinan atau top manajemen, peranan manajemen sangat berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan sumberdaya manusianya, Pasal 125 ayat 1 Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan pasal 2 Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang. Dan pada pasal 126 ayat 1 disebutkan bahwa LKPP melakukan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aspek manajemen dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan IT. Disamping itu juga perlu dipersiapkan Keppres yang mengatur pelaksanaan *e-procurement*, serta melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* dengan memberikan informasi/ data pelelangan/ tender kepada publik/ masyarakat

Pelaksana Sistem *e-procurement*

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuisioner kepada pegawai yang terkait dengan pelaksanaan proses *e-procurement* (Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bagian Perencanaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilingkungan Politeknik Negeri Malang.

Kompetensi

Bidang kompetensi untuk pegawai atau staf yang bertugas di seluruh aspek pekerjaan yang berhubungan dengan *e-procurement* baik secara langsung maupun tidak langsung sudah sangat bisa dikatakan sangat kompeten dimana jenjang pendidikan, pelatihan, kursus, seminar, workshop, sertifikat pengadaan barang jasa sudah terpenuhi untuk pelaksanaan kegiatan *e-procurement* dengan kata lain sudah terpenuhi untuk pelaksanaan *e-procurement*. Sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 19 menyatakan bahwa sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

Pengalaman Sumberdaya Manusia

Pengalaman sumberdaya manusia yang ada di Politeknik Negeri Malang khususnya dibagian bagian yang terkait dengan pelaksanaan e-procurement sudah terpenuhi dan mempunyai pengalaman yang memadai untuk menyelesaikan tugas e-procurement (sesuai tupoksi) yang dapat menunjang keberhasilan e-procurement. Untuk mendukung profesionalisme SDM pengadaan barang/jasa, pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN - RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.

Motivasi Sumberdaya Manusia

Kegiatan lelang secara e-procurement dibutuhkan adanya motivasi dari pimpinan, teman satu kelompok kerja dan Politeknik Negeri Malang untuk memberikan suport pelaksanaan e-procurement sampai berhasil. Sulistiyani (2003:189) mengatakan bahwa kinerja pegawai akan lebih memberikan penekanan pada dua faktor utama: (a) keinginan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja yang kemudian akan menghasilkan usaha-usaha pegawai tersebut, (b) kemampuan dari pegawai untuk bekerja.

Kerjasama, Komunikasi, Koordinasi Sumberdaya Manusia

Kelompok kerja unit pelayanan pengadaan sangat lah membutuhkan Kerjasama, Komunikasi, Koordinasi Sumberdaya Manusia disemua lini untuk keberhasilan pelaksanaan e-procurement, tanpa adanya itu tidak mungkin akan terlaksana atau keberhasilan e-procurement tersebut.

Pengembangan Sumberdaya Manusia

Hasil wawancara disimpulkan bahwa perlunya perhatian khusus untuk pengembangan sumberdaya manusia ini karena sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pegawai atau staf yang ada, Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disebutkan pada Pasal 125 ayat 1 Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KESIMPULAN

Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya merupakan penjabaran dari pelaksanaan belanja negara untuk mendapatkan produk/jasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Pengadaan barang/jasa di Indonesia secara khusus diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya dengan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Serta perpres no 54 Tahun 2010 beserta perubahan perubahannya.

Konsep tentang *e-procurement* merupakan tahapan modern dari tata cara pengadaan di dunia. Konsep ini terdiri dari serangkaian prosedur, dan langkah-langkah organisasional dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang memungkinkan seluruh proses pengadaan dijalankan secara online melalui fasilitas jaringan internet. Konsep *e-procurement* instansi pemerintah secara bertahap telah menggantikan penggunaan metode pengadaan secara konvensional.

Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di dalam proses pelaksanaan *e-procurement* guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan lelangnya, perlu diperhatikan bahwa sumber daya manusia yang ada terutama yang ada di dalam unit layanan pengadaan barang atau jasa harus mempunyai beberapa kriteria seperti kompetensi khusus, keahlian/kemampuan tentang sistem informasi yang terupdate, pengalaman, mempunyai motivasi yang tinggi, serta bisa berkomunikasi, kerjasama serta koordinasi tim

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, I. D. K. ., Brahmayanti, I. ., & Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), pp.42-55. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.42-55>
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Penerbit BPFE. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Huda, M. (2017). Perpustakaan dan Mutu Pendidikan: Peran Dan Tantangan Perpustakaan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 5(2), 341–364.
- Leksono, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Radjawali Grafindo.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Aditama.
- Mas'ud, A., Kresnani, E. (2019). Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang . *Jurnal Arthavidya*, 19(2), 101–118.
- Megananda, E. (2023). Analisis Employee Engagement Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 25(2), 272–289. <https://doi.org/10.37303/a.v25i2.469>
- Moehariono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalia Indonesia.
- Mokoginta, R., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 343–354. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18662>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, s.p. 2012. Evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) pada lpse kementerian keuangan. Tesis. Universitas indonesia.
- Nurmandi, a., & Kim, s. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: a comparison of three indonesian cities. *International journal of public sector management*, 28(3), p198-220.
- Nyanyi, P. H., Sungkawati, E., & Harmadji, D. E. (2022). Upaya Pengembangan Sdm Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 8(2), 27–40. <https://doi.org/10.37303/embeji.v8i2.157>
- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Hanisah, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(1), 30–36. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.76>

- Putra Nugraha, A. S., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2022). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 72. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38241>
- Sahar, N., & Sari, S. R. (2022). Arajang : Implementasi E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan POLitik*, 5(2), 163–179. <https://ojs.unsulbar.ac.id/>
- Sari, A. M., Wijaya, A. F., & Wachid, A. (2012). Penerapan Konsep Green Economy Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Studi pada Dusun Kungkuk , Desa Punten Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 765–770.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan XX). Bumi Aksara.
- Sitinjak, W., Anugrah, R., Andary, R. W., Sungkawati, E., Badrianto, Y., Sulaiman, S., Rokhmawati, D., & Aditya Wardhana, Mohammad Dullah, Novi Marlana, E. G. (2021). Kinerja Karyawan (Era Transformasi Digital). In Hartini (Ed.), *Media Sains Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). Media Sains Indonesia.
- Widiastuti, E. (2019). Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Batik Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(1). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1286>
- Wijayanti, P. A., & Ardana, D. M. J. (2021). Implementasi Electronic Procurement Dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(1), 52–72. <https://doi.org/10.37637/locus.v13i1.708>